

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara berkembang umumnya memiliki struktur perekonomian cenderung rentan dengan adanya guncangan terhadap kestabilan kegiatan perekonomian. Perekonomian selalu menjadi perhatian yang paling penting dikarenakan apabila perekonomian dalam kondisi yang tidak stabil maka akan timbul masalah-masalah ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran dan tingginya tingkat inflasi. Indikator – indikator ekonomi makro sangat berperan dalam menstabilkan perekonomian. Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara adalah inflasi, karena perubahan dalam indikator ini akan berdampak langsung terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi.

Inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara dimana naiknya turunya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting, laju perubahannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Fenomena inflasi merupakan masalah klasik bagi perekonomian yang hingga saat ini masih memberikan trauma mendalam. Pada dasarnya fenomena inflasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal, baik yang berpengaruh secara langsung maupun tidak. Menurut Chandra (2006) inflasi yang rendah mampu mendorong negara dalam meningkatkan

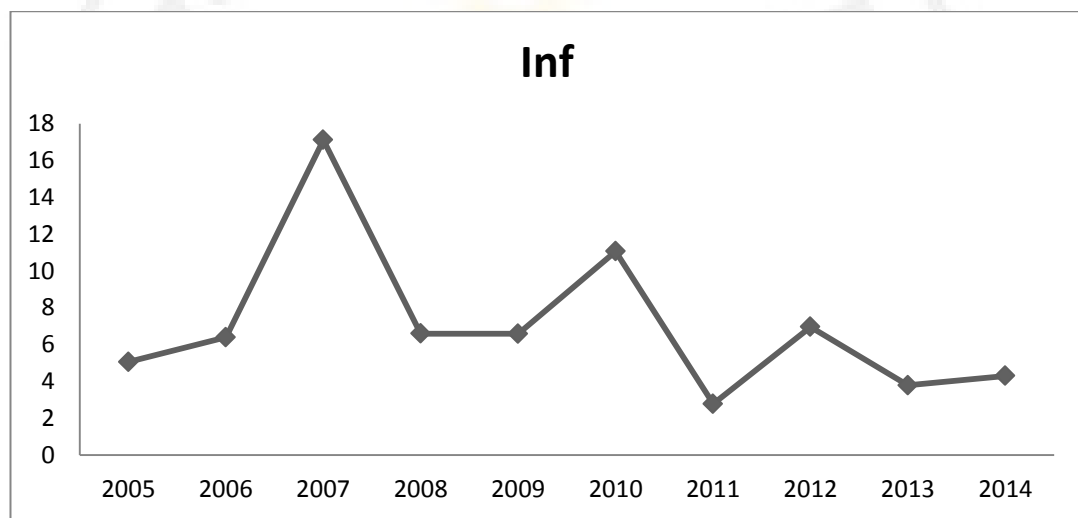
kapasitas outputnya, namun di sisi lain inflasi yang tinggi juga menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian. Dengan menjaga stabilitas inflasi, pelaku ekonomi akan merasa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas ekonominya, sehingga dapat membawa dampak positif pada perekonomian yang tercermin melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran (Pohan, 2008:29). Dengan kata lain pencapaian stabilitas inflasi merupakan langkah awal untuk mencapai stabilitas nasional.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi dituangkan dalam Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang bank Indonesia yang telah di amandemen menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2004 pasal 7, yang menyatakan bahwa Indonesia telah menganut kebijakan moneter dengan sasaran tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dengan kata lain, kebijakan moneter lebih difokuskan untuk mengendalikan fluktuasi tingkat harga agar tidak memicu tekanan inflasi melalui berbagai instrumen dan strategi kebijakan.

Strategi kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan Bank Indonesia dengan menargetkan pada angka tertentu dengan *range* deviasi  $\pm 1\%$  dikenal dengan istilah Kerangka Kerja Kebijakan Moneter atau dengan kata lain *Inflation Targetting Framework* (ITF) dengan bertujuan untuk menjaga dan mencapai perubahan inflasi yang rendah dan stabil dalam jangka panjang, namun tetap memberikan ruang gerak pada inflasi melalui pengaturan instrumen kebijakan jangka pendek. Menurut Arimurti dan Trisnanto dalam Langi, dkk (2014: 46) implementasi *Inflation Targetting Framework* (ITF) pada tahun 2005 menjadi tonggak sejarah perubahan kerangka kebijakan moneter tersebut adalah dalam rangka mengadopsi kerangka kebijakan yang lebih kredibel, yang mengacu pada

penggunaan suku bunga sebagai operational target dan kebijakan yang bersifat antisipatif. ITF diharapkan dapat mengubah *backward looking expectation*, yang menjadi sumber masih tingginya inflasi, menjadi *forward looking expectation*. Dengan demikian, diharapkan ITF dapat mendorong penurunan persistensi inflasi. Untuk melihat perkembangan inflasi di Indonesia hingga saat ini pada gambar 1.1 sebagai berikut:

### 1.1 Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2005– 2014



Sumber : Bank Indonesia, 2014 (diolah)

**Gambar 1.1 Perkembangan Tingkat Inflasi di Indonesia Periode 2005-2014**

Dari gambar 1.1. menjelaskan perkembangan inflasi selama tahun 2005 sebesar 5,06% dan terus meningkat pada tahun 2006 menjadi 6,4%, hingga tahun 2007 tercatat kondisi inflasi yang sangat tinggi menjadi 17,11%, namun pada tahun 2008 inflasi kembali menurun menjadi 6,6% tetapi pada tahun 2010 inflasi terus bertambah menjadi 11,06%. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pada tahun 2013 Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga otoritas perbankan di Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Peningkatan jumlah uang yang beredar yang cukup

signifikan ditahun 2013 menyebabkan suku bunga bank juga meningkat tajam, pada gilirannya harga-harga barang dan jasa juga ikut naik.

Kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari kegiatan pembayaran uang. Lalu lintas pembayaran uang berarti menyangkut jumlah uang yang beredar. Perubahan dalam jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian di berbagai sektor. Menurut teori kuantitas uang, salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi adalah jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga (inflasi tinggi) melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah maka kelesuan ekonomi akan terjadi.

Apabila hal ini berlangsung terus menerus, kemakmuran masyarakat secara keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan. Dengan demikian pengelolaan jumlah uang beredar harus selalu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan pengaruh yang akan terjadi. Irving Fisher menyatakan bahwa "pada hakikatnya perubahan jumlah uang yang beredar akan menimbulkan perubahan dalam jumlah uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya atas harga", yang berarti peningkatan persentase jumlah uang beredar akan sama dengan peningkatan persentase tingkat inflasi (Mankiw, 2003:258). Perkembangan jumlah uang beredar, Pengeluaran pemerintah, nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1. Perkembangan jumlah uang beredar, PDB, nilai tukar dan impor di Indonesia Periode Tahun 1996-2014**

Tahun	JUB	PDB	Nilai Tukar	Impor
1996	121.121	227,37	2.383	42.928,50
1997	76.482	215,75	4.650	41.679,80
1998	71.948	95,45	8.025	27.336,90
1999	91.207	140	7.085	24.003,30
2000	77.856	165,02	9.595	33.514,80
2001	81.159	160,45	10.400	30.962,10
2002	98.870	195,66	9.595	31.288,90
2003	113.140	232,77	10.400	32.550,70
2004	111.252	256,84	8.940	46.524,50
2005	122.356	285,87	8.447	57.700,90
2006	153.270	364,57	9.290	61.065,50
2007	175.142	432,22	9.830	74.473,40
2008	173.136	510,24	9.020	129.197,30
2009	227.807	539,58	9.419	96.829,20
2010	274.853	709,19	10.950	135.663,30
2011	308.315	845,93	9.400	177.435,60
2012	337.742	876,72	8.991	191.689,50
2013	306.449	868,35	9.333	186.628,70
2014	336.885	890,73	9.670	178.178,80

Sumber : Bank Indonesia, 2014 (diolah)

Dari tabel di atas terlihat jumlah uang beredar dari tahun 1996-2014 terus mengalami peningkatan. Menurut teori bahwa ketika terjadi kelebihan penawaran uang akan mendorong suku bunga menurun sehingga menyebabkan mata uang domestik terdepresiasi. (Krugman: 1994).

peningkatan penawaran uang tidak dibarengi dengan penurunan suku bunga, hal ini dikarenakan variabel suku bunga memiliki koefisien hubungan yang *ambigu* terhadap nilai tukar. Yang pertama, ketika kenaikan tingkat bunga dalam negeri mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan penawaran dipasar uang. Pada saat yang sama, tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi keinginan masyarakat memegang uang. Sebagai akibatnya akan terjadi

kelebihan uang (*excess money balance*) di pasar uang dalam negeri. Hal ini akan mengakibatkan depresiasi mata uang dalam negeri. Disisi lain, pengaruh kedua dapat terjadi kenaikan tingkat bunga dalam negeri akan menarik aliran modal masuk kedalam negeri. Hal ini karena kenaikan tingkat bunga dirasa lebih menguntungkan bagi investor untuk memindahkan dana kedalam negeri. Adanya aliran modal masuk akan mengakibatkan apresiasi mata uang dalam negeri. (Kholidin: 2002).

Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2002: 222) apabila jumlah uang beredar bertambah sebanyak 5%, maka tingkat harga-harga juga akan bertambah sebanyak 5%. Atau sebaliknya, apabila jumlah uang beredar berkurang sebesar 5%, maka tingkat harga-harga akan berkurang sebesar 5%.

Selanjutnya Tucker, et all (1991), menyatakan bahwa hubungan antara jumlah uang beredar dengan nilai tukar rupiah adalah positif sedangkan hubungan antara pendapatan riil dan suku bunga terhadap nilai tukar adalah negatif. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya yang dijelaskan oleh Howrey (1994) dimana jumlah uang beredar dan suku bunga berpengaruh positif terhadap nilai tukar.

Teori kuantitas uang beredar tampaknya sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan jumlah uang beredar di Indonesia selaras dengan fluktuasi inflasi. (Pertumbuhan uang yang tinggi cenderung memiliki inflasi yang tinggi).

Pendapatan domestik bruto riil (PDB) pasca krisis ekonomi global 2008, sejak 2014 hingga tahun 2014 angka pertumbuhan PDB riil mengalami gejolak naik turun. Kondisi perekonomian Indonesia cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan. Menurut Krugman (1994), penurunan output riil mendorong penurunan permintaan uang sehingga menyebabkan suku bunga menurun suku bunga dengan asumsi *ceteris paribus*. Pada saat suku bunga menurun maka mata uang domestik akan terdepresiasi. Sebaliknya kenaikan output riil meningkatkan suku bunga dengan asumsi *ceteris paribus* (tingkat harga dan penawaran uang tetap atau diabaikan). Kenaikan output riil menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan uang. Akibat dari kelebihan permintaan uang akan mendorong suku bunga naik sehingga mata uang domestik akan terapresiasi. Hal ini berarti suku bunga domestik berpengaruh negatif terhadap nilai tukar (*kurs*).

Faktor lain yang mempengaruhi inflasi adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Keynesian, kenaikan GDP sisi pengeluaran akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Bila jumlah permintaan efektif terhadap komoditas meningkat, pada tingkat harga berlaku, melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka *inflationary gap* akan timbul dan menimbulkan masalah inflasi. Studi keterkaitan inflasi dan pertumbuhan ekonomi banyak menghasilkan temuan bahwa keduanya bisa berhubungan positif atau juga bisa berhubungan negatif. Hasil studi Bashir, Nazwar, dkk (2011) serta Nugroho & Basuki menunjukkan bahwa GDP berpengaruh positif terhadap inflasi. Disisi lain, studi Tafti (2012) dan Auragzeb & Ul Haq (2012) menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap inflasi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi inflasi adalah nilai tukar atau kurs. Krisis moneter yang terjadi tahun 1998 telah membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dikarenakan adanya kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi telah meningkat hingga mencapai 77.63% pada saat itu. Menurut Atmadja (1999:63), inflasi di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor (*imported inflation*) dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika. Depresiasi atau kenaikan nominal nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang negara lain akan meningkatkan harga barang impor karena melemahnya nilai tukar mata uang suatu negara. Jika kontribusi impor memiliki peranan penting terhadap perekonomian, khususnya terhadap proses produksi, maka depresiasi nilai tukar mata uang dapat meningkatkan biaya produksi sehingga menyebabkan kenaikan tingkat harga domestik dan memicu kenaikan inflasi.

Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas pada periode 1997 hingga sekarang. Sejak pertengahan Juli 1997, Rupiah mengalami tekanan yang mengakibatkan semakin melemahnya nilai Rupiah terhadap US Dollar. Tekanan tersebut diakibatkan oleh adanya currency turmoil yang melanda Thailand dan menyebar ke negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Untuk mengatasi tekanan tersebut, Bank Indonesia melakukan intervensi baik melalui *spot exchange rate* (kurs langsung) maupun *forward exchange rate* (kurs berjangka) dan untuk sementara dapat menstabilkan nilai tukar Rupiah. Namun untuk selanjutnya tekanan terhadap depresiasi Rupiah semakin meningkat.



Oleh karena itu dalam rangka mengamankan cadangan devisa yang terus berkurang, pada tanggal 14 Agustus 1997, Bank Indonesia memutuskan untuk menghapus rentang intervensi sehingga nilai tukar Rupiah dibiarkan mengikuti mekanisme pasar.

Harga impor juga dapat mempengaruhi inflasi. Indonesia dengan ekonomi terbuka, masih tergantung pada impor. Hal ini rawan karena dapat mengakibatkan kenaikan biaya impor dari negara-negara yang nilai mata uangnya naik. Naiknya kurs dari suatu negara menyebabkan kenaikan harga barang-barang yang diimpor. Jika negara tersebut mengimpor bahan-bahan baku atau produk dari negara lain, karena nilai mata uangnya naik maka harga barang-barang yang menggunakan bahan baku impor mengalami kenaikan. Hal inilah yang memicu terjadinya inflasi. Studi yang dilakukan Tafti (2012) dan Akinbobola (2012) menyatakan bahwa harga impor berpengaruh positif terhadap inflasi.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas dan mengingat belum optimalnya pelaksanaan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi, peneliti merasa perlu dan tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Inflasi di Indonesia yang difokuskan pada variabel Jumlah Uang Beredar, PDB, Kurs dan Harga Impor di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh jumlah uang beredar, Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs, dan impor berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah uang beredar, Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs, dan impor berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia.

#### 2. Manfaat praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.
- b. Dengan mengetahui pengaruh masing-masing faktor yang diteliti dapat dipakai sebagai informasi bagi Indonesia dalam penentu kebijakan untuk melakukan upaya maksimal analisis determinan inflasi di Indonesia.